



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA**

TESIS

**ASPEK PERPAJAKAN ATAS PENJUALAN ECERAN BAHAN BAKAR
MINYAK DI INDONESIA OLEH STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR
MINYAK UMUM SWASTA ASING YANG MENGGUNAKAN SISTEM
*COMPANY OWN DEALER OPERATE***

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi**

Oleh :
Nama : Andi Mohammad Johan
NPM : 0606017826
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

**Jakarta
2008**

Lembar Pernyataan Orisinalitas



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Saya bersedia menerima sanksi bila dikemudian hari ditemukan adanya penjiplakan dalam tesis ini.

Andi Mohammad Johan
0606017826

Jakarta, 19 Juni 2008

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Andi Mohammad Johan
NPM : 0606017826
Judul : Aspek Perpajakan Atas Penjualan Eceran Bahan Bakar Minyak Di
Indonesia Oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum Swasta
Asing Yang Menggunakan Sistem *Company Own Dealer Operate*

Dosen Pembimbing

Dr. Haula Rosdiana, M.Si

**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICS SCIENCE
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
POST GRADUATE PROGRAM
ADMINISTRATIVE SCIENCE PROGRAM
MAJORING ADMINISTRATIVE AND TAX POLICY**

ABSTRACT

**Andi Mohammad Johan
0606017826**

**TAX ASPECT ON SALES RETAIL OF FUEL IN INDONESIA THROUGH
FOREIGN COMPANY FUEL STATIONS WITH COMPANY OWN DEALER
OPERATE SYSTEM**

**xiv + 103 pages + 10 pictures + 18 table + Bibliography (27 books, 6
articles, 3 thesis, 10 rules) + 7 Enclosures**

One of important of new law oil and gas number 22 year 2001 is paradigm change from monopoly to multiplayer. Liberalizing downstream business as one of the keywords to deregulation, including refining, transportation, storage, distribution, and marketing the products, will also be conducted in an open and more transparent way. All players are free to enter the market, including state and regional owned company, cooperatives, and private companies. This is expected to give room for market mechanism.

In running the sale of fuel through fuel station, there are three systems that could be adopted i.e.: first is Codo system, which company own company operate, second is Codo systems, which company own dealer operate and then is Dodo systems, which distributor own dealer operate. In the above systems, the price to end users (price at the fuel stations level stations) will be the same and will be determined by foreign company. Therefore, the research analysis will cover the tax obligations and procedures on sale of fuel through fuel station by the CODO Systems.

This research used with library study and an interview with a tax division officer foreign company as own company and dealear of fuel station. The main problems of this research firstly is what is a tax component that including as a pump price or selling price to end customers at fuel station, secondly is what is tax aspect on sales retail of fuel in Indonesia by dealer fuel station with codo systems and last research question is how is company implementing new circular letter of director general of taxation number 14/PJ./2008 about a collector of income tax article 22.

From this research result, find out that a purchasing price from dealers to company is not same and determined by foreign company every two weeks, not only following market fuel price but also business purpose. On sales retail of fuel outcome three principle tax aspect are value added tax, motor vehicle fuel tax and income tax article 22 on the sales of its production. Before new circular letter number 14/PJ./, income tax article 22 paid by distributors/agents is final in nature and collected upon the issuance of delivery order, and now company not only as a collector, but also paid it dealer tax payable.



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

ABSTRAK

Andi Mohammad Johan

0606017826

**ASPEK PERPAJAKAN ATAS PENJUALAN ECERAN BAHAN BAKAR
MINYAK DI INDONESIA OLEH STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR
MINYAK UMUM SWASTA ASING YANG MENGGUNAKAN SISTEM
COMPANY OWN DEALER OPERATE**

**xiv + 103 halaman + 10 gambar + 18 tabel + Daftar Pustaka (27 buku, 6
artikel, 3 tesis, 10 peraturan) + 7 lampiran**

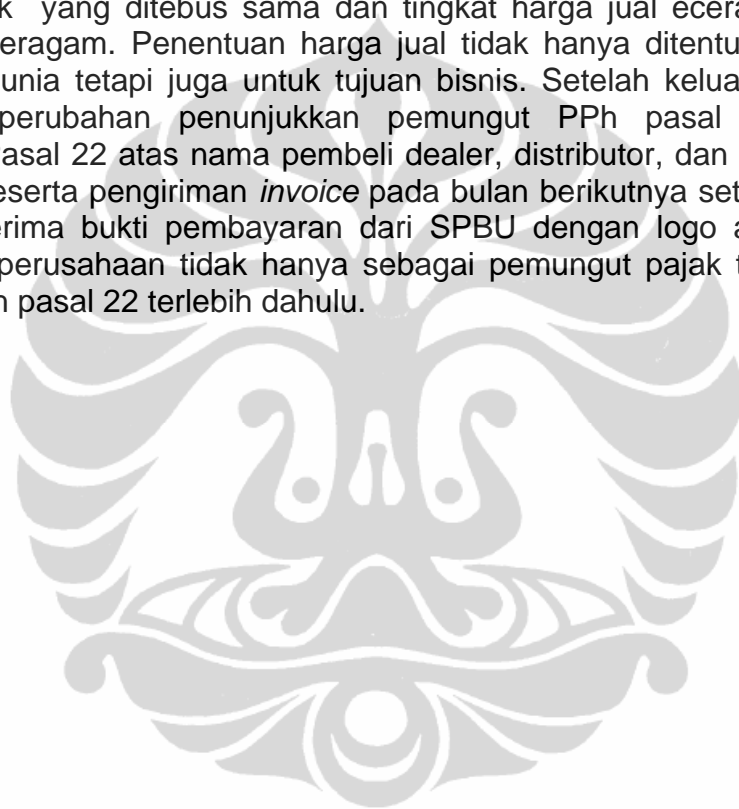
Pelaksanaan kegiatan hilir minyak dan gas di Indonesia memasuki babak baru dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan diberlakukannya UU migas yang baru terjadi perubahan pada pasar di sektor hilir migas yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, dari pola yang monopolistik menjadi kegiatan yang terbuka melalui mekanisme pasar. Pengakhiran monopoli oleh Pertamina berarti pembukaan peluang investasi bagi asing dalam berbisnis eceran bahan bakar minyak.

Dalam menjalankan bisnis penjualan *retail* BBM melalui SPBU, ada 3 sistem yang bisa dipakai yaitu yang pertama sistem COCO : *Company Own Company Operate* (perusahaan asing memiliki dan mengoperasikan sendiri SPBU). Kedua sistem CODO : *Company Own Dealer Operate* (perusahaan asing berhak memiliki SPBU tapi yang mengoperasikan harus mitra local). Dan yang terakhir sistem DODO : *Distributor Own Dealer Operate* (perusahaan minyak asing hanya memasok BBM, namun SPBU yang menjadi penjualnya 100% dimiliki dan dioperasikan oleh usaha local). Kemudian, analisis penelitian akan membahas aspek perpajakan atas penjualan eceran bahan bakar minyak di Indonesia oleh stasiun pengisian bahan bakar minyak umum swasta asing yang menggunakan sistem *company own dealer operate*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan juga studi kepustakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama apa saja komponen pajak yang termasuk dalam harga jual eceran pada SPBU dengan logo asing, kemudian bagaimana perlakuan pajak atas penjualan bahan bakar minyak oleh

SPBU asing yang menjalankan bisnis di Indonesia dengan sistem kepemilikan *CODO* (*Company Own Dealer Operate*) dan yang terakhir bagaimana perusahaan yang menjalankan bisnis SPBU dengan logo asing mengimplementasikan surat edaran Dirjen Pajak tentang perubahan penunjukkan pemungut Pajak PPh Pasal 22.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa selain berhak menentukan harga jual di tingkat konsumen akhir, perusahaan juga berhak menentukan harga tebus yang berbeda antar SPBU. hal ini menyebabkan perbedaan pajak yang dibayarkan SPBU dengan logo asing ini pun berbeda, sekalipun volume atau jumlah liter minyak yang ditebus sama dan tingkat harga jual eceran kepada konsumen akhir seragam. Penentuan harga jual tidak hanya ditentukan harga pasaran minyak dunia tetapi juga untuk tujuan bisnis. Setelah keluarnya surat edaran tentang perubahan penunjukkan pemungut PPh pasal 22, bukti penyeteroran PPh Pasal 22 atas nama pembeli dealer, distributor, dan pelanggan akan dikirimkan beserta pengiriman *invoice* pada bulan berikutnya setelah pihak perusahaan menerima bukti pembayaran dari SPBU dengan logo asing atau dengan kata lain perusahaan tidak hanya sebagai pemungut pajak tetapi juga membayarkan PPh pasal 22 terlebih dahulu.



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Andi Mohammad Johan
NPM : 0606017826
Judul : Aspek Perpajakan Atas Penjualan Eceran Bahan Bakar Minyak Di Indonesia Oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum Swasta Asing Yang Menggunakan Sistem *Company Own Dealer Operate*

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universtas Indonesia, pada hari Kamis tanggal 19, bulan Juni, tahun 2008 dan telah dinyatakan :
LULUS

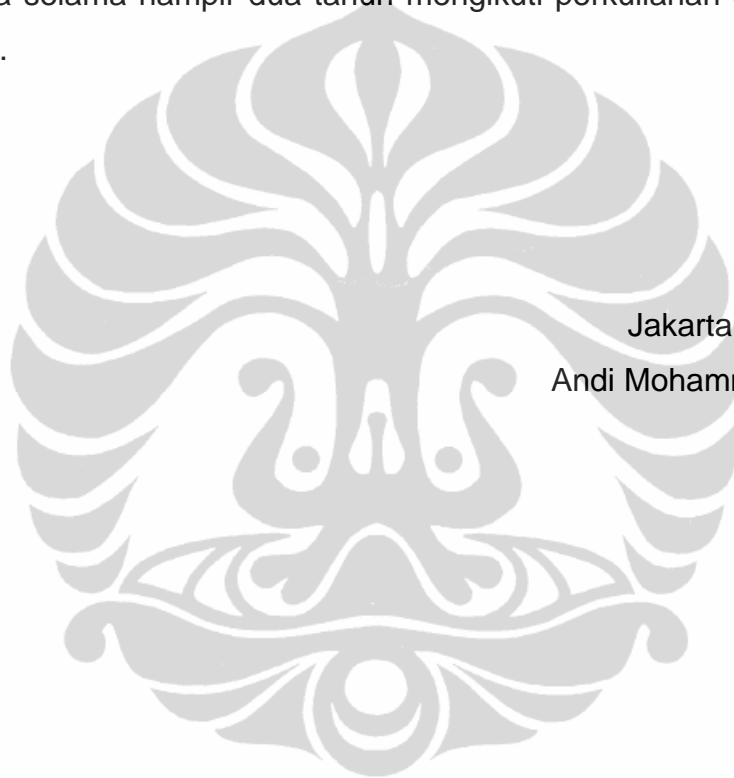
Tim Penguji :
Ketua Sidang :
Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein (.....)
Sekretaris Sidang :
Drs. Achmad Lutfi, M.Si (.....)
Pembimbing :
Dr. Haula Rosdiana, M.Si (.....)
Penguji Ahli :
Dra. Titi Muswati Putranti, M.Si (.....)

Kata Pengantar

Rasa syukur ALHAMDULILLAH peneliti panjatkan atas segala Rahmat dan Karunia “Raja Manusia” ALLAH S.W.T, yang telah menghamparkan kekuatan lahir dan bathin kepada hamba-Nya ini dalam proses pembuatan tesis. Dalam menyelaraskan kata demi kata dalam tesis ini, peneliti dibantu oleh banyak pihak, oleh karena itu perlu mengucapkan terima kasih tak terhingga, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein Selaku Ketua Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi FISIP UI dan juga selaku ketua sidang.
2. Dr. Haula Rosdiana, M.Si., sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga guna membimbing peneliti dengan segala kebaikan dan kemurahan hatinya.
3. Dra. Titi Muswati Putranti, M.Si., sebagai penguji ahli yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian.
4. Drs. Achmad Lutfi, M.Si., sebagai sekretaris sidang yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian.
5. Seluruh keluarga di rumah, Papa dan Mama, Sarah, Ilham, Lia, Dedi, Syifa Yasmin Fatiha, Adam atas semua kehangatan dan keceriaannya.
6. Keluarga bapak iqbal dan mbak olie, serta abi.
7. Mas Didin dan Pak Abas atas rasa kebersamaannya selama melakukan penelitian.
8. Semua teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Pasca Sarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan khususnya Angkatan XII , Program Sarjana Ekstensi Administrasi Fiskal tahun 2003, Program Diploma III Administrasi Pajak tahun 2000
9. Seluruh staf pengajar, staf sekretariat dan staf perpustakaan Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Khususnya Mas Deni, Mas Erwin, Mbak Ninik dan Mas Pri.

10. Dealer-dealer SPBU yang telah membuka pikiran penulis dan di tengah kesibukannya bersedia untuk di wawancarai.
11. Semua Partner di JEL Tax Advisory, khususnya Bapak Trisna Lukman, yang telah memberikan semangat dan banyak kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Secara khusus peneliti sampaikan rasa terima kasih dari hati yang terdalam untuk Erlin Yuliantina, yang telah memberikan dorongan, doa dan pengertiannya selama hampir dua tahun mengikuti perkuliahan di program pascasarjana.



Jakarta, Juni 2008
Andi Mohammad Johan

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pernyataan Orisinalitas	ii
Abstract	iii
Abstrak	v
Lembar Persetujuan Tesis	vii
Lembar Pengesahan Tesis	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Pokok Permasalahan	8
I.3 Tujuan Penelitian	8
I.4 Ruang Lingkup Penelitian	9
I.5 Signifikansi Penelitian	9
I.6 Sistematika Penelitian	10
BAB II Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian	12
II.1 Tinjauan Literatur	12
II.1.1 Fungsi Pajak	12
II.1.2 Sistem Perpajakan	13
II.1.3 Struktur Pajak yang Baik	16
II.1.4 <i>Withholding Tax System</i>	18
II.1.5. Sistem Pemungutan Pajak	25
II.1.6 Jenis Pajak	25
II.1.7 Pengertian Penghasilan	30
II.1.8 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	32
II.1.9 Pajak Daerah	36
II.2. Metode Penelitian	39
II.2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
II.2.2 Teknik Pengumpulan Data	41

II.2.3 Teknik analisis Data	42
BAB III Mekanisme Bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum Asing	44
III.1 Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas	44
III.2 Perkembangan Bisnis SPBU Asing Di Indonesia	55
III.3 Kegiatan Operasional Pada SPBU Asing	59
III.4 Hak dan Kewajiban Dealer SPBU dalam Aspek Keuangan dan Pajak	64
BAB IV Aspek Pajak pada Penjualan Eceran Bahan Bakar Minyak pada SPBU Asing	66
IV.1 Komponen Pajak Dalam Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	66
IV.2 Aspek Pajak Pada Penjualan Eceran Bahan Bakar Minyak Melalui SPBU Asing Menurut Sistem CODO (<i>Company Own Dealer Operate</i>)	81
IV.2.1 Pajak Pertambahan Nilai	81
IV.2.2 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	84
IV.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22	92
IV.3 Implementasi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE/14/PJ/ 2008 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22	95
BAB V Kesimpulan dan Saran	
V.1 Kesimpulan	101
V.2 Saran	102
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1	Perbedaan Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung	29
Tabel II.2	Ilustrasi Nilai Tambah Atas Kegiatan Suatu Perusahaan Berdasarkan Output-Input	33
Tabel II.3	Ilustrasi Nilai Tambah Atas Kegiatan Suatu Perusahaan Berdasarkan Selisih Antar Tingkatan Usaha	34
Tabel II.4	Persamaan Penghitungan Nilai Tambah	34
Tabel III.1	Daftar Harga Jual BBM Per Liter di Negara-negara Asia Tenggara	58
Tabel IV.1	Harga Eceran BBM SPBU dengan Logo Asing	70
Tabel IV.2	Perbandingan Selisih <i>Margin</i> antar SPBU jenis Ron 92	71
Tabel IV.3	Perbandingan Selisih <i>Margin</i> antar SPBU jenis Ron 95	
Tabel IV.4	Perbandingan Selisih <i>Margin</i> antar SPBU minyak solar	
Tabel IV.5	Perhitungan Komponen Pajak SPBU A jenis bensin Ron 92	74
Tabel IV.6	Perhitungan Komponen Pajak SPBU A jenis bensin Ron 95	76
Tabel IV.7	Perhitungan Komponen Pajak SPBU A jenis Minyak solar	78
Tabel IV.8	Perhitungan Komponen PPN pada SPBU Nasional	80
Tabel IV.9	Perhitungan Komponen PBBKB pada SPBU Nasional	81
Tabel IV.10	Lokasi SPBU terhadap Lokasi pemungutan PBBKB	88
Tabel IV.11	Laporan Jumlah PBBKB Terhutang April 2007-Maret 2008	88
Tabel IV.12	Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Bahan Bakar Minyak	94
Tabel IV.13	<i>Tax Base</i> Penjualan Bahan Bakar Minyak	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1 Arus Penjualan Eceran BBM SPBU	7
Gambar III.1 Pemberlakuan Undang-undang dan Peraturan Di Indonesia Di Bidang Migas	45
Gambar III.2 <i>Reform Philosophy</i>	47
Gambar III.3 Kegiatan Utama Industri Hilir Migas	48
Gambar III.4 Mekanisme Perizinan Pengusahaan SPBU	54
Gambar III.5 Proses Kegiatan Pemesanan BBM SPBU dengan Logo Asing kepada Perusahaan dengan Logo Asing	63
Gambar IV.1 Ilustrasi Komponen Pajak pada Invoice untuk Dealer	69
Gambar IV.2 PPN dalam Harga Jual Konsumen Per Liter	84
Gambar IV.3 Proses Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Tentang Penembusan Migas Sebelum Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-14/P.J./2008	97
Gambar IV.4 Proses Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Tentang Penembusan Migas Setelah Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-14/P.J./2008	98